

Perbandingan Transformasi Digital Administrasi Publik Di Australia Dan Indonesia

¹Beby Anastasya, ²Indah Apriliani, ³Nurmaisya Regina, ⁴Muhammad idris, ⁵Erinaldi

¹²³⁴⁵Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning Dumai

Korespondensi : erinaldipratama2905@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital dalam administrasi publik telah menjadi agenda penting dalam reformasi birokrasi modern di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan implementasi transformasi digital administrasi publik di Australia dan Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi komparatif berbasis studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi lembaga internasional, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia telah mencapai tingkat kematangan transformasi digital yang tinggi dengan sistem pemerintahan digital yang terintegrasi, berbasis data, serta didukung oleh tata kelola kelembagaan yang kuat dan konsisten. Sementara itu, Indonesia masih berada pada tahap pengembangan melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), namun masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi sistem, keterbatasan interoperabilitas data, serta kesenjangan infrastruktur dan sumber daya manusia. Perbandingan kedua negara menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh aspek kelembagaan, kebijakan, dan kapasitas organisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital merupakan proses multidimensi yang memerlukan integrasi antara teknologi, tata kelola, dan sumber daya manusia untuk mencapai layanan publik yang efektif dan efisien.

Kata kunci: Transformasi digital; administrasi publik; e-government; perbandingan kebijakan; Australia; Indonesia.

Abstract

Digital transformation in public administration has become a key agenda in modern bureaucratic reform in various countries. This study aims to analyze and compare the implementation of digital transformation in public administration in Australia and Indonesia. The approach used was a qualitative comparative study method based on literature review. Data were collected from various secondary sources such as scientific journals, government reports, and international institution publications, then analyzed using content analysis techniques. The results show that Australia has achieved a high level of digital transformation maturity with an integrated, data-driven digital government system supported by strong and consistent institutional governance. Meanwhile, Indonesia is still in the development stage through the implementation of the Electronic-Based Government System (ESBS), but still faces challenges such as system fragmentation, limited data interoperability, and gaps in infrastructure and human resources. The comparison of the two countries shows that the success of digital transformation is determined not only by technological factors, but also by institutional aspects, policies, and organizational capacity. This study confirms that digital transformation is a multidimensional process that requires the integration of technology, governance, and human resources to achieve effective and efficient public services.

Keyword: Digital transformation; public administration; e-government; policy comparison; Australia; Indonesia

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam administrasi publik merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi paling signifikan di abad ke-21. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong perubahan mendasar dalam cara pemerintah menyelenggarakan layanan publik, mengelola data, serta berinteraksi dengan masyarakat. Transformasi ini tidak lagi terbatas pada digitalisasi layanan

melalui e-government, tetapi telah berkembang menjadi konsep yang lebih luas yaitu digital government, yang mencakup integrasi sistem pemerintahan, pemanfaatan data lintas sektor, otomatisasi proses kebijakan, serta peningkatan kapasitas tata kelola berbasis teknologi. Dalam perspektif global, transformasi digital dipandang sebagai instrumen penting untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Organisasi internasional seperti OECD, World Bank, dan United Nations secara konsisten menempatkan digital government sebagai indikator penting dalam mengukur kualitas tata kelola publik modern. Negara-negara yang mampu mengembangkan ekosistem digital yang matang cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi serta kapasitas pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya merupakan isu teknologi, tetapi juga menyangkut perubahan struktural dalam administrasi publik dan tata kelola pemerintahan (*public governance transformation*) (Agustin and others 2026).

Perkembangan transformasi digital juga tidak dapat dilepaskan dari konsep *public value creation*, yaitu bagaimana teknologi digunakan untuk menciptakan nilai publik yang lebih besar melalui peningkatan kualitas layanan, efisiensi biaya, serta keterbukaan informasi. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai platform yang memungkinkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan teknologi dengan reformasi kelembagaan dan kebijakan publik. Australia sering dijadikan salah satu negara acuan dalam implementasi digital government karena keberhasilannya dalam mengembangkan sistem layanan publik yang terintegrasi dan berorientasi pada warga (*citizen-centric services*). Pemerintah Australia secara konsisten mengembangkan strategi digital nasional yang menekankan interoperabilitas sistem, pemanfaatan data terpadu, serta peningkatan kualitas layanan berbasis kebutuhan masyarakat. Lembaga seperti *Digital Transformation Agency* (DTA) berperan penting dalam mengoordinasikan kebijakan digital lintas sektor, memastikan standarisasi sistem, serta mendorong inovasi dalam layanan publik berbasis teknologi (Yogopriyatno and IP n.d.).

Sebaliknya, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dalam transformasi digital administrasi publik melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan integrasi layanan digital di seluruh instansi pemerintahan, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Berbagai inovasi seperti layanan perizinan digital, sistem administrasi kependudukan berbasis online, hingga digitalisasi layanan pajak menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendorong reformasi digital. Namun demikian, implementasi SPBE masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketimpangan kesiapan digital antar lembaga, fragmentasi sistem informasi, keterbatasan interoperabilitas data, serta perbedaan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, tantangan utama dalam transformasi digital di Indonesia juga berkaitan dengan aspek koordinasi kelembagaan dan tata kelola data. Banyaknya aplikasi dan sistem digital yang dikembangkan oleh masing-masing instansi sering kali menyebabkan duplikasi sistem dan kurangnya integrasi (Pratama and Phahlevy 2025). Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya membutuhkan investasi teknologi, tetapi juga reformasi tata kelola yang mampu memastikan sinkronisasi kebijakan dan standar operasional antar lembaga pemerintah. Di sisi lain, pengalaman Australia menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat ditentukan oleh adanya kepemimpinan digital yang kuat (*digital leadership*) serta pendekatan kebijakan yang terpusat namun fleksibel. Integrasi layanan publik digital di Australia didukung oleh strategi jangka panjang yang konsisten, serta mekanisme evaluasi berbasis data yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Hal ini menjadi salah satu pembeda utama dengan negara berkembang, di mana kebijakan digital sering kali bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi.

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sektor publik sangat dipengaruhi oleh faktor teknis dan non-teknis. Heeks menekankan bahwa kegagalan implementasi e-government sering terjadi akibat kesenjangan antara desain sistem dan realitas konteks institusional. Sementara itu, Imran dan Gregor menunjukkan bahwa negara berkembang menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam implementasi e-government karena keterbatasan kapasitas administratif dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, Wescott menegaskan bahwa tingkat kesiapan digital suatu negara sangat memengaruhi pola adopsi teknologi dalam sektor publik (Khotimah et al. 2025). Dalam konteks yang lebih luas, transformasi digital juga memiliki implikasi terhadap hubungan antara negara dan warga negara. Digitalisasi layanan publik telah mengubah pola interaksi dari yang bersifat hierarkis menjadi lebih partisipatif dan transparan. Masyarakat kini tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital. Namun demikian, kesenjangan digital (*digital divide*) masih menjadi tantangan serius yang dapat memengaruhi aksesibilitas layanan publik, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Perbandingan antara Australia dan Indonesia menjadi penting untuk memahami bagaimana perbedaan konteks institusional, kapasitas birokrasi, serta strategi kebijakan memengaruhi hasil transformasi digital administrasi publik. Australia dengan tingkat kematangan digital yang lebih tinggi dapat memberikan pembelajaran terkait integrasi sistem, penguatan tata kelola data, dan pengembangan layanan berbasis pengguna. Sementara itu, Indonesia memberikan perspektif mengenai tantangan implementasi transformasi digital dalam konteks birokrasi yang besar, desentralisasi pemerintahan, dan ketimpangan infrastruktur digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan transformasi digital administrasi publik di Australia dan Indonesia, dengan fokus pada aspek kebijakan, implementasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam proses transformasi digital tersebut (Djatkiko 2023). Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur administrasi publik digital serta memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan kebijakan transformasi digital di sektor publik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif (*comparative study*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan membandingkan secara mendalam transformasi digital administrasi publik di Australia dan Indonesia, khususnya dalam aspek kebijakan, implementasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara kontekstual berdasarkan berbagai sumber literatur tanpa melakukan manipulasi variabel. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada transformasi digital dalam administrasi publik di dua negara, yaitu Australia dan Indonesia. Objek kajian meliputi kebijakan transformasi digital pemerintah, implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, infrastruktur teknologi informasi sektor publik, tata kelola dan integrasi layanan digital, serta tantangan yang dihadapi dalam proses digitalisasi administrasi pemerintahan. Fokus penelitian ini mencakup beberapa dimensi utama, yaitu kebijakan transformasi digital yang meliputi strategi dan regulasi pemerintah; implementasi digital government dalam pelayanan publik; infrastruktur digital sebagai pendukung utama sistem pemerintahan elektronik; tata kelola kelembagaan yang mencakup koordinasi antarinstansi dan integrasi sistem; serta tantangan implementasi seperti keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan digital, dan hambatan teknis maupun non-teknis lainnya (Iriani et al. 2022).

Penelitian ini tidak dilakukan di lokasi lapangan secara langsung, melainkan menggunakan metode studi literatur (*desk study*) yang berfokus pada Australia dan Indonesia. Seluruh data yang digunakan diperoleh dari berbagai dokumen akademik dan laporan resmi yang relevan dengan topik

penelitian. Dalam penelitian ini tidak digunakan konsep populasi dan sampel secara statistik, melainkan sumber data dianalogikan sebagai populasi berupa seluruh literatur terkait transformasi digital administrasi publik di kedua negara. Adapun sampel data dipilih secara purposive, yaitu sumber-sumber yang paling relevan, kredibel, dan terbaru, seperti artikel jurnal ilmiah, laporan Digital Transformation Agency Australia, dokumen Kementerian PANRB Indonesia, serta laporan lembaga internasional seperti OECD, World Bank, dan United Nations. Bahan utama dalam penelitian ini berupa jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan resmi dari pemerintah dan organisasi internasional. Sementara itu, alat yang digunakan meliputi perangkat komputer atau laptop, akses internet, serta database akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect untuk mendukung proses pengumpulan literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (*document analysis*) dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan transformasi digital administrasi publik (Muhyi 2018). Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian seperti kebijakan, implementasi, infrastruktur, tata kelola, dan tantangan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan komparatif. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data relevan, dilanjutkan dengan reduksi data untuk memilih informasi yang sesuai fokus penelitian, kemudian dilakukan pengkategorian data berdasarkan tema utama. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara Australia dan Indonesia untuk melihat persamaan dan perbedaan, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi data yang didukung oleh teori administrasi publik digital (Lubis 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Digital Administrasi Publik di Australia

Hasil kajian menunjukkan bahwa Australia telah mencapai tingkat kematangan yang sangat tinggi dalam transformasi digital administrasi publik jika dibandingkan dengan banyak negara lain, termasuk negara berkembang. Transformasi ini tidak hanya ditandai oleh keberhasilan digitalisasi layanan publik, tetapi juga oleh perubahan mendasar dalam arsitektur tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis data. Pemerintah Australia secara konsisten mengembangkan strategi digital *government* yang bersifat nasional dan terkoordinasi melalui lembaga utama seperti **Digital Transformation Agency (DTA)**. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menyusun standar, mengarahkan kebijakan lintas sektor, serta memastikan bahwa seluruh instansi pemerintah bergerak dalam kerangka transformasi digital yang selaras dan tidak berjalan secara parsial. Dengan adanya DTA, Australia mampu mengurangi fragmentasi kebijakan digital yang sering menjadi masalah utama dalam transformasi digital di banyak negara. Lebih lanjut, sistem layanan publik di Australia telah berkembang menuju model *citizen-centric services*, yaitu pendekatan yang menempatkan warga negara sebagai pusat dari desain layanan publik. Dalam pendekatan ini, layanan tidak lagi disusun berdasarkan struktur birokrasi internal, melainkan berdasarkan kebutuhan, pengalaman, dan preferensi masyarakat. Implementasi konsep ini terlihat dari integrasi berbagai layanan publik dalam satu platform digital yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus berhadapan dengan kompleksitas birokrasi antarinstansi. Transformasi ini juga memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas karena proses layanan dapat dipantau secara digital dan lebih terukur (Sangaji and Irianto 2025). Selain dari sisi layanan, Australia juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan data pemerintahan melalui implementasi **interoperabilitas data antarinstansi**. Sistem ini memungkinkan pertukaran data secara real-time, aman, dan terstandarisasi antar lembaga pemerintah. Interoperabilitas ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi, karena mengurangi duplikasi data, meningkatkan efisiensi

administrasi, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, pemerintah Australia telah mengembangkan standar data nasional dan kerangka keamanan informasi yang ketat untuk memastikan bahwa integrasi data tidak menimbulkan risiko terhadap privasi dan keamanan publik.

Tidak hanya berhenti pada integrasi data, Australia juga telah memasuki tahap lanjutan dalam transformasi digital yang dikenal sebagai **data driven government**. Pada tahap ini, pemerintah tidak hanya menggunakan teknologi digital untuk mendigitalisasi proses administrasi, tetapi juga memanfaatkan **big data, artificial intelligence (AI), dan advanced analytics** dalam proses perumusan kebijakan publik. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan prediksi kebutuhan layanan, mengidentifikasi pola sosial-ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy making*). Dengan demikian, transformasi digital di Australia telah berkembang dari sekadar efisiensi administratif menuju peningkatan kualitas tata kelola publik yang lebih strategis dan proaktif. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang bersifat struktural dan institusional. Salah satu faktor utama adalah adanya **kepemimpinan digital yang kuat (digital leadership)** yang mampu mendorong agenda transformasi secara konsisten di seluruh sektor pemerintahan. Kepemimpinan ini memastikan bahwa transformasi digital tidak bersifat sporadis, melainkan menjadi agenda nasional jangka panjang yang berkelanjutan. Selain itu, **konsistensi kebijakan publik** juga menjadi faktor kunci, di mana strategi digital pemerintah tidak sering berubah secara drastis sehingga memungkinkan implementasi yang stabil dan terarah (Syafitri et al. 2025).

Faktor lainnya adalah **ketersediaan infrastruktur digital yang maju dan merata**, yang mencakup jaringan internet berkecepatan tinggi, sistem keamanan siber yang kuat, serta platform digital pemerintah yang terintegrasi. Infrastruktur ini menjadi fondasi penting dalam mendukung seluruh proses digitalisasi layanan publik. Di samping itu, **kapasitas sumber daya manusia (SDM)** di sektor publik Australia juga relatif tinggi, terutama dalam hal literasi digital, kemampuan analisis data, serta adaptasi terhadap teknologi baru. Pemerintah secara aktif melakukan pengembangan kompetensi ASN untuk memastikan bahwa transformasi digital didukung oleh aparatur yang siap secara teknis dan manajerial. Selain faktor-faktor tersebut, keberhasilan transformasi digital di Australia juga didukung oleh **koordinasi antar lembaga yang efektif** melalui penerapan standar nasional dalam pengembangan sistem digital. Standarisasi ini mengurangi risiko tumpang tindih sistem, memperkuat interoperabilitas, serta memastikan bahwa setiap instansi pemerintah mengikuti kerangka arsitektur digital yang sama. Dengan adanya pendekatan ini, Australia mampu menciptakan ekosistem digital government yang lebih kohesif, terstruktur, dan berorientasi jangka panjang. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital di Australia bukan hanya merupakan proses adopsi teknologi, tetapi telah menjadi transformasi menyeluruh dalam cara pemerintah merancang kebijakan, mengelola data, serta memberikan layanan publik. Hal ini menjadikan Australia sebagai salah satu contoh negara dengan tingkat kematangan digital governance yang tinggi dan dapat menjadi rujukan bagi negara lain dalam mengembangkan strategi transformasi digital di sektor public (Imelda, Hasanuddin, and Waliadin 2026).

Transformasi Digital Administrasi Publik di Indonesia

Berbeda dengan Australia, hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital administrasi publik di Indonesia masih berada pada tahap **pengembangan (developing stage)**, di mana proses digitalisasi pemerintahan telah berjalan secara progresif namun belum sepenuhnya mencapai integrasi yang matang. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda transformasi digital melalui implementasi kebijakan **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** sebagai kerangka utama digitalisasi sektor publik. SPBE dirancang untuk mewujudkan integrasi layanan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam implementasinya, berbagai inovasi digital telah dikembangkan di berbagai

sektor, seperti layanan administrasi kependudukan berbasis daring, sistem perizinan elektronik (*online single submission*), digitalisasi perpajakan, hingga pengembangan berbagai aplikasi layanan publik di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Namun demikian, meskipun berbagai kemajuan tersebut telah dicapai, implementasi SPBE masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah **fragmentasi sistem digital antarinstansi**, yang menyebabkan rendahnya tingkat integrasi data dan layanan. Banyak instansi pemerintah masih mengembangkan sistem dan aplikasi digital secara independen tanpa standar integrasi yang seragam, sehingga menimbulkan duplikasi sistem, ketidaksinkronan data, serta inefisiensi dalam pengelolaan layanan publik (Yulanda and Adnan 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital di Indonesia masih cenderung bersifat sektoral (*silo-based*) dibandingkan terintegrasi secara menyeluruh (*whole-of-government approach*). Selain itu, tantangan lain yang cukup signifikan adalah **kesenjangan infrastruktur digital** antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang luas menghadapi hambatan besar dalam pemerataan akses internet, kualitas jaringan, serta ketersediaan infrastruktur teknologi informasi. Ketimpangan ini berdampak langsung pada kualitas layanan digital yang tidak merata, sehingga sebagian masyarakat di daerah tertentu masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan publik berbasis elektronik. Dengan demikian, transformasi digital belum sepenuhnya mampu menciptakan inklusivitas layanan publik secara nasional (Sepriano et al. 2023).

Dari perspektif tata kelola, implementasi transformasi digital di Indonesia juga masih menghadapi tantangan dalam hal **koordinasi antar lembaga pemerintahan**. Meskipun telah terdapat upaya penguatan regulasi dan pembentukan kerangka arsitektur SPBE nasional, koordinasi antarinstansi dalam implementasi masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih beragamnya standar sistem, perbedaan platform digital, serta belum meratanya penerapan interoperabilitas data antar lembaga. Akibatnya, proses integrasi layanan publik sering kali berjalan lambat dan belum sepenuhnya mendukung prinsip *one government data*. Selain aspek kelembagaan, **kapasitas sumber daya manusia (SDM)** juga menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan transformasi digital di Indonesia. Terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat literasi digital dan kemampuan teknis antara aparatur di tingkat pusat dan daerah. Di beberapa wilayah, keterbatasan kompetensi digital aparatur masih menjadi hambatan dalam optimalisasi penggunaan sistem elektronik pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya membutuhkan infrastruktur teknologi, tetapi juga penguatan kapasitas manusia sebagai pelaksana utama kebijakan digital. Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, penting untuk dicatat bahwa komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong transformasi digital terus menunjukkan perkembangan yang positif. Pemerintah secara bertahap memperkuat regulasi, memperluas implementasi SPBE, serta mengembangkan arsitektur digital nasional untuk mendorong integrasi sistem pemerintahan. Selain itu, berbagai inisiatif reformasi birokrasi digital juga terus dilakukan guna meningkatkan efisiensi layanan publik dan mempercepat proses digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital di Indonesia merupakan proses yang masih berada dalam tahap konsolidasi dan penyesuaian. Meskipun telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam digitalisasi layanan publik, tantangan dalam hal integrasi sistem, kesenjangan infrastruktur, koordinasi kelembagaan, serta kapasitas SDM masih menjadi pekerjaan utama yang perlu diselesaikan. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan (Irfan and Anirwan 2023).

Perbandingan Transformasi Digital Australia dan Indonesia

Perbandingan menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara Australia dan Indonesia dalam hal tingkat kematangan transformasi digital administrasi publik. Secara keseluruhan,

Australia telah mencapai fase *mature digital government*, yaitu tahap di mana transformasi digital tidak lagi dipandang sebagai proyek teknologi semata, tetapi telah terintegrasi secara sistemik ke dalam keseluruhan tata kelola pemerintahan. Pada tahap ini, digitalisasi tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga telah mengubah cara pemerintah merancang kebijakan, mengelola data, dan berinteraksi dengan masyarakat secara lebih adaptif, responsif, dan berbasis bukti. Sementara itu, Indonesia masih berada pada tahap **konsolidasi dan penguatan integrasi sistem digital**, di mana berbagai inisiatif transformasi digital telah berkembang cukup pesat, namun masih menghadapi tantangan dalam penyatuan arsitektur sistem, standardisasi layanan, serta integrasi data lintas instansi. Dari aspek kebijakan, perbedaan utama terlihat pada tingkat **konsistensi, kesinambungan, dan sentralisasi strategi digital government**. Australia memiliki strategi transformasi digital jangka panjang yang relatif stabil dan terarah melalui lembaga seperti **Digital Transformation Agency (DTA)** yang berfungsi sebagai pengendali utama arah kebijakan digital nasional (Arif and Kunci 2024). DTA tidak hanya berperan sebagai regulator teknis, tetapi juga sebagai pengarah strategis yang memastikan bahwa seluruh instansi pemerintah mengikuti standar, prinsip, dan arsitektur digital yang sama. Pendekatan ini menghasilkan keselarasan kebijakan (*policy alignment*) yang tinggi serta meminimalisasi fragmentasi implementasi di lapangan. Sebaliknya, Indonesia masih berada dalam proses penguatan **arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** yang melibatkan banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan tingkat koordinasi yang bervariasi. Meskipun telah terdapat regulasi dan pedoman nasional, implementasinya masih menunjukkan variasi yang cukup besar antarinstansi, sehingga integrasi kebijakan digital belum sepenuhnya berjalan secara seragam dan menyeluruh.

Dari sisi implementasi, Australia telah berhasil mengembangkan **ekosistem layanan publik digital yang terintegrasi dan berbasis data (*integrated data driven public services*)**. Dalam sistem ini, berbagai layanan publik dirancang untuk saling terhubung melalui platform digital tunggal yang memungkinkan akses layanan secara cepat, efisien, dan minim birokrasi. Integrasi ini didukung oleh interoperabilitas data yang kuat, yang memungkinkan pertukaran informasi antarinstansi secara real-time dengan standar keamanan dan privasi yang tinggi. Selain itu, Australia juga telah memanfaatkan teknologi lanjutan seperti ***big data analytics, artificial intelligence, dan automation systems*** dalam mendukung proses pengambilan keputusan publik, sehingga transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat kualitas kebijakan berbasis data (*evidence-based policy making*) (Arfani and Ambardi 2024).

Sebaliknya, implementasi transformasi digital di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang cukup kompleks, terutama dalam bentuk **fragmentasi sistem informasi pemerintahan**. Banyak instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih mengembangkan aplikasi dan sistem digital secara independen sesuai kebutuhan sektoral masing-masing. Kondisi ini menyebabkan terjadinya duplikasi sistem, ketidaksinkronan data, serta rendahnya interoperabilitas antarplatform. Akibatnya, integrasi layanan publik secara menyeluruh masih sulit dicapai. Meskipun beberapa inisiatif seperti integrasi layanan perizinan melalui OSS (Online Single Submission) dan layanan kependudukan digital telah menunjukkan kemajuan, namun secara sistemik Indonesia masih berada pada tahap awal menuju integrasi digital yang utuh (*whole-of-government digital integration*). Perbedaan juga sangat terlihat pada aspek **infrastruktur digital dan pemerataan teknologi**. Australia memiliki infrastruktur digital yang relatif matang, stabil, dan merata di seluruh wilayah, termasuk jaringan internet berkecepatan tinggi, sistem cloud government yang terintegrasi, serta keamanan siber yang kuat. Infrastruktur ini menjadi fondasi penting dalam mendukung seluruh proses digitalisasi layanan publik secara konsisten. Selain itu, investasi berkelanjutan dalam pengembangan teknologi informasi memungkinkan Australia untuk terus memperkuat kapasitas inovasi dalam sektor publik. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal **kesenjangan digital (*digital divide*)** yang dipengaruhi oleh kondisi geografis sebagai negara kepulauan dengan sebaran infrastruktur yang tidak merata (Khairani and Sendjaja 2024). Wilayah

perkotaan umumnya telah memiliki akses digital yang relatif baik, namun di banyak daerah terpencil masih terdapat keterbatasan jaringan internet, perangkat teknologi, dan infrastruktur pendukung lainnya. Ketimpangan ini berdampak langsung pada kualitas implementasi layanan digital yang belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital di Indonesia masih menghadapi tantangan inklusivitas layanan publik berbasis digital.

Selain infrastruktur, aspek **kapasitas sumber daya manusia (SDM)** juga menjadi faktor pembeda yang signifikan. Di Australia, aparatur sipil negara memiliki tingkat literasi digital yang tinggi serta didukung oleh program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Hal ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan memanfaatkan sistem digital secara optimal dalam proses pelayanan publik. Sementara itu, di Indonesia, kapasitas SDM masih sangat bervariasi antar wilayah dan instansi. Di beberapa daerah, keterbatasan literasi digital aparatur menjadi hambatan dalam implementasi sistem pemerintahan elektronik secara efektif, sehingga transformasi digital belum sepenuhnya dapat dioptimalkan. Jika dilihat secara lebih luas, perbedaan antara Australia dan Indonesia dalam transformasi digital juga dipengaruhi oleh faktor **tata kelola pemerintahan dan struktur administratif negara** (Ainia et al. 2025). Australia dengan sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan koordinatif memungkinkan implementasi kebijakan digital berjalan lebih konsisten dan terstandarisasi. Sebaliknya, Indonesia dengan sistem desentralisasi memiliki tantangan tambahan dalam menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, yang sering kali menyebabkan variasi implementasi di tingkat lokal. Secara keseluruhan, analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital administrasi publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kombinasi berbagai faktor struktural dan institusional. Australia menunjukkan model transformasi digital yang matang, terintegrasi, dan berbasis data, sementara Indonesia masih berada dalam fase transisi menuju sistem digital pemerintahan yang lebih terpadu, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kesenjangan antara kedua negara tidak hanya mencerminkan perbedaan tingkat kemajuan teknologi, tetapi juga perbedaan dalam kapasitas tata kelola, konsistensi kebijakan, serta kesiapan ekosistem digital secara keseluruhan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan

Analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang secara signifikan memengaruhi perbedaan tingkat transformasi digital administrasi publik antara Australia dan Indonesia. Faktor pertama adalah kapasitas kelembagaan (*institutional capacity*). Dalam hal ini, Australia memiliki struktur tata kelola digital yang lebih terpusat, terkoordinasi, dan efektif melalui lembaga seperti *Digital Transformation Agency (DTA)* yang berperan sebagai pengarah utama kebijakan digital nasional. Struktur kelembagaan ini memungkinkan adanya standarisasi, pengawasan, serta koordinasi lintas sektor yang kuat, sehingga implementasi transformasi digital dapat berjalan secara konsisten di seluruh instansi pemerintahan. Sebaliknya, Indonesia masih berada dalam proses penguatan kapasitas kelembagaan digital melalui implementasi SPBE yang melibatkan banyak aktor lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga koordinasi sering kali menghadapi tantangan akibat perbedaan kewenangan, prioritas, dan tingkat kesiapan masing-masing instansi (Farasa and Kusuma 2025).

Faktor kedua adalah konsistensi kebijakan (*policy consistency*). Australia menunjukkan tingkat konsistensi kebijakan yang relatif tinggi dalam pengembangan transformasi digital, di mana strategi digital government disusun dalam kerangka jangka panjang yang stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan meskipun terjadi pergantian pemerintahan. Hal ini menciptakan kesinambungan implementasi yang kuat dan memungkinkan pembangunan sistem digital yang terintegrasi secara bertahap namun berkelanjutan. Sementara itu, di Indonesia, kebijakan transformasi digital masih mengalami proses penyesuaian dan penyempurnaan regulasi secara berkelanjutan. Meskipun telah terdapat kerangka SPBE

sebagai pedoman nasional, implementasinya masih menunjukkan variasi interpretasi di tingkat operasional, sehingga konsistensi implementasi antarinstansi belum sepenuhnya seragam.

Faktor ketiga adalah infrastruktur digital (*digital infrastructure readiness*). Australia memiliki infrastruktur digital yang lebih maju, stabil, dan merata, termasuk jaringan internet berkecepatan tinggi, sistem keamanan siber yang kuat, serta integrasi platform layanan publik yang sudah matang. Infrastruktur ini menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi digital yang berkelanjutan, karena memungkinkan seluruh layanan publik berjalan secara efisien dan terhubung dalam satu ekosistem digital. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan infrastruktur digital, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Kondisi geografis yang luas serta keterbatasan akses jaringan di beberapa wilayah menyebabkan implementasi layanan digital belum dapat berjalan secara optimal dan merata di seluruh wilayah.

Faktor keempat adalah kesiapan sumber daya manusia (*human resource readiness*). Di Australia, aparatur sipil negara umumnya memiliki tingkat literasi digital yang tinggi serta didukung oleh program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Hal ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi serta mengoptimalkan penggunaan sistem digital dalam pelayanan publik. Sebaliknya, di Indonesia, kesiapan SDM masih sangat bervariasi antar instansi dan wilayah. Di beberapa daerah, keterbatasan kemampuan digital aparatur menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik secara efektif dan berkelanjutan (Maulita, Framita, and Nailufaroh 2022).

Selain keempat faktor utama tersebut, terdapat pula faktor kontekstual yang turut memengaruhi perbedaan transformasi digital antara kedua negara, yaitu kondisi geografis dan sistem pemerintahan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas menghadapi tantangan geografis yang kompleks dalam pembangunan infrastruktur digital dan integrasi sistem pemerintahan. Kondisi ini diperkuat dengan sistem desentralisasi pemerintahan yang memberikan otonomi luas kepada daerah, sehingga kebijakan digital sering kali diimplementasikan dengan tingkat variasi yang tinggi antarwilayah. Sebaliknya, Australia dengan wilayah yang relatif lebih terpusat dan sistem pemerintahan yang lebih terkonsolidasi memungkinkan implementasi kebijakan digital dilakukan secara lebih seragam, terstruktur, dan mudah dikendalikan dari tingkat nasional. Secara keseluruhan, kombinasi faktor kelembagaan, kebijakan, infrastruktur, sumber daya manusia, serta kondisi geografis dan tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa transformasi digital bukan hanya fenomena teknologi semata, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor struktural, institusional, dan kontekstual. Hal ini menjelaskan mengapa Australia dapat mencapai tingkat kematangan digital yang lebih tinggi, sementara Indonesia masih berada dalam proses transisi menuju sistem pemerintahan digital yang lebih terintegrasi dan inklusif (Astuti 2025).

Peran Teknologi dan Inovasi dalam Transformasi Digital

Selain faktor kebijakan dan kelembagaan, hasil kajian juga menunjukkan bahwa tingkat adopsi teknologi, kedalaman integrasi digital, serta kapasitas inovasi teknologi merupakan faktor pembeda yang sangat signifikan dalam transformasi digital administrasi publik antara Australia dan Indonesia. Dalam konteks ini, Australia telah berada pada tahap yang lebih maju dengan mengimplementasikan pendekatan *data driven government* secara komprehensif, yaitu model pemerintahan yang menjadikan data sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan, penyediaan layanan publik, serta evaluasi kinerja pemerintahan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada digitalisasi proses administratif, tetapi juga pada pemanfaatan teknologi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih prediktif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, pemerintah Australia telah mengintegrasikan berbagai teknologi canggih seperti *artificial intelligence* (AI), *machine learning*, *cloud computing*, *Internet of Things* (IoT), serta *advanced big data analytics* ke dalam sistem administrasi

publik. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan analisis data secara real-time, mengidentifikasi pola kebutuhan masyarakat, serta merancang kebijakan publik yang lebih akurat dan berbasis bukti (*evidence-based policy making*). Selain itu, integrasi teknologi digital juga memungkinkan otomatisasi berbagai proses birokrasi yang sebelumnya bersifat manual, sehingga meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, serta mempercepat waktu respons layanan publik. Lebih jauh, integrasi teknologi tersebut juga berkontribusi terhadap pengembangan layanan publik yang lebih personalized, proactive, dan seamless. Dalam model ini, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan pasif, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem digital yang memungkinkan interaksi dua arah dengan pemerintah secara lebih dinamis. Sistem layanan publik di Australia dirancang untuk saling terhubung melalui platform digital terpadu yang memungkinkan pertukaran data antarinstansi secara aman, cepat, dan terstandarisasi. Hal ini memperkuat prinsip *whole-of-government approach*, di mana seluruh instansi bekerja dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi (Setiowati et al. 2026).

Di sisi lain, Indonesia masih berada pada tahap transisi awal menuju integrasi teknologi digital lanjutan dalam administrasi publik. Meskipun berbagai inisiatif digital telah berkembang cukup pesat, seperti penerapan layanan berbasis cloud, digitalisasi administrasi kependudukan, serta sistem layanan perizinan berbasis elektronik, namun pemanfaatan teknologi tingkat lanjut seperti *AI*, *machine learning*, dan *big data analytics* masih terbatas pada sektor-sektor tertentu dan belum menjadi bagian utama dari sistem pemerintahan secara menyeluruh. Dengan kata lain, adopsi teknologi di Indonesia masih cenderung bersifat fragmentatif dan belum terintegrasi secara sistemik dalam kerangka besar transformasi digital nasional. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa transformasi digital di Indonesia masih lebih berfokus pada digitalisasi layanan (*digitization and digitalization*) dibandingkan dengan transformasi berbasis data (*digital transformation in its advanced form*). Banyak sistem yang telah dikembangkan masih berjalan secara sektoral dan belum sepenuhnya terhubung dalam satu arsitektur digital nasional yang terpadu. Akibatnya, potensi pemanfaatan data lintas sektor belum dapat dioptimalkan secara maksimal untuk mendukung pengambilan keputusan strategis di tingkat pemerintahan. Selain itu, keterbatasan integrasi teknologi di Indonesia juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung lainnya, seperti belum optimalnya standarisasi data nasional, keterbatasan interoperabilitas sistem, serta perbedaan kapasitas infrastruktur digital antarinstansi. Kondisi ini menyebabkan setiap instansi cenderung mengembangkan solusi teknologi secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing, yang pada akhirnya menciptakan ekosistem digital yang terfragmentasi. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang analitik data dan teknologi canggih juga menjadi tantangan dalam mempercepat adopsi inovasi digital di sektor publik. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa kesiapan teknologi (*technological readiness*) dan kapasitas inovasi (*innovation capacity*) merupakan faktor fundamental yang sangat menentukan kedalaman, kualitas, dan keberlanjutan transformasi digital di sektor publik. Negara yang memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi secara menyeluruh ke dalam sistem tata kelola pemerintahan cenderung mampu mencapai tingkat kematangan digital yang lebih tinggi, tidak hanya dalam aspek efisiensi layanan, tetapi juga dalam hal kualitas pengambilan keputusan, transparansi, serta akuntabilitas publik. Dalam konteks perbandingan ini, Australia menunjukkan karakteristik sebagai negara dengan ekosistem inovasi digital yang matang dan terintegrasi, di mana teknologi digital telah menjadi bagian inti dari sistem pemerintahan (*core governance infrastructure*). Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi telah bertransformasi menjadi fondasi utama dalam pengelolaan pemerintahan modern yang berbasis data dan otomatisasi. Sementara itu, Indonesia masih berada dalam fase penguatan fondasi transformasi digital, di mana fokus utama masih pada perluasan digitalisasi layanan dasar, peningkatan konektivitas, serta pengembangan integrasi sistem sebelum sepenuhnya memasuki tahap pemerintahan digital berbasis kecerdasan data yang menyeluruh. Dengan demikian, perbedaan tingkat adopsi teknologi antara Australia dan Indonesia tidak hanya mencerminkan kesenjangan dalam aspek teknologi semata, tetapi juga

menggambarkan perbedaan dalam tingkat kematangan ekosistem digital secara keseluruhan, termasuk kesiapan institusi, sumber daya manusia, serta strategi inovasi nasional dalam mendukung transformasi administrasi public(Awalliyah, Rahma, and Sofiani 2025).

Tantangan Utama dalam Implementasi Transformasi Digital

Hasil analisis juga mengidentifikasi bahwa terdapat sejumlah tantangan utama dalam transformasi digital administrasi publik yang dihadapi oleh Australia dan Indonesia, meskipun karakteristik serta tingkat kompleksitasnya berbeda secara signifikan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tantangan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan sistem digital yang telah dicapai oleh masing-masing negara. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kematangan digital suatu negara, maka tantangan yang dihadapi cenderung bergeser dari isu-isu fundamental menuju isu-isu yang lebih kompleks dan strategis. Di Australia, tantangan utama dalam transformasi digital lebih banyak berkaitan dengan aspek lanjutan (*advanced challenges*) yang muncul seiring dengan tingginya tingkat integrasi sistem digital yang telah dicapai. Salah satu isu utama adalah keamanan siber (*cybersecurity*), yang menjadi perhatian penting mengingat tingginya ketergantungan pemerintah terhadap sistem digital terintegrasi dan penggunaan data dalam skala besar. Ancaman terhadap keamanan data, potensi serangan siber, serta perlindungan terhadap infrastruktur digital menjadi fokus utama dalam menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan digital. Selain itu, isu perlindungan privasi data masyarakat juga menjadi tantangan yang semakin penting, terutama dalam konteks meningkatnya penggunaan big data dan analitik dalam pengambilan keputusan publik. Tantangan lainnya di Australia adalah kebutuhan untuk terus melakukan pembaruan dan adaptasi sistem teknologi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk selalu memperbarui infrastruktur digital, meningkatkan kapasitas sistem, serta mengadopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi secara berkelanjutan. Meskipun Australia telah memiliki sistem yang relatif matang, tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital bersifat dinamis dan membutuhkan investasi serta inovasi yang berkelanjutan agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi global(Indonesia and Republik n.d.).

Sebaliknya, Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dan bersifat multi-dimensi, mencakup aspek infrastruktur, kelembagaan, sumber daya manusia, hingga budaya birokrasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur digital, terutama di wilayah terpencil dan daerah dengan akses teknologi yang masih rendah. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan distribusi infrastruktur digital tidak merata, sehingga implementasi layanan pemerintahan berbasis elektronik belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Selain itu, tantangan penting lainnya adalah rendahnya literasi digital aparatur sipil negara di beberapa wilayah. Perbedaan tingkat kemampuan digital ini berdampak langsung pada efektivitas implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, karena keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan, mengelola, dan mengoptimalkan teknologi yang tersedia. Ketidaksiapan SDM ini sering kali menjadi penghambat dalam proses adopsi teknologi baru di lingkungan birokrasi. Tantangan berikutnya adalah belum optimalnya integrasi antar sistem informasi pemerintahan, yang menyebabkan masih tingginya tingkat fragmentasi dalam pengelolaan data dan layanan publik. Banyak instansi pemerintah masih menggunakan sistem yang berbeda-beda tanpa interoperabilitas yang memadai, sehingga menghambat terciptanya sistem pemerintahan digital yang terintegrasi secara nasional. Selain itu, resistensi terhadap perubahan (*resistance to change*) dalam birokrasi juga menjadi faktor penting yang memperlambat proses transformasi digital. Budaya kerja yang masih konvensional serta kekhawatiran terhadap perubahan sistem kerja sering kali menghambat implementasi inovasi digital secara optimal(Bahasoan et al. 2025).

Jika dibandingkan secara lebih luas, perbedaan tantangan antara Australia dan Indonesia menunjukkan adanya pergeseran karakteristik tantangan berdasarkan tingkat kematangan digital. Pada negara dengan tingkat kematangan tinggi seperti Australia, tantangan lebih berfokus pada isu-isu lanjutan seperti keamanan data, privasi, tata kelola data, dan optimalisasi teknologi canggih. Sementara itu, pada negara berkembang seperti Indonesia, tantangan masih didominasi oleh isu-isu dasar seperti pemerataan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi sistem digital. Dengan demikian, perbandingan ini menegaskan bahwa transformasi digital bukanlah proses yang linier, melainkan sebuah perjalanan bertahap yang kompleks, di mana setiap tahap perkembangan menghadirkan jenis tantangan yang berbeda. Hal ini juga menunjukkan bahwa strategi kebijakan dalam transformasi digital harus disesuaikan dengan tingkat kematangan masing-masing negara agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Transformasi digital memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap tata kelola pemerintahan (*public governance*) di kedua negara, baik Australia maupun Indonesia, meskipun tingkat dampak dan kedalamannya menunjukkan perbedaan yang cukup jelas. Dalam konteks Australia, digitalisasi pemerintahan telah menjadi instrumen utama dalam memperkuat prinsip-prinsip good governance, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta responsivitas layanan publik. Integrasi sistem digital yang telah matang memungkinkan proses administrasi pemerintahan dilakukan secara lebih terbuka dan dapat dipantau, sehingga mengurangi ruang terjadinya inefisiensi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Lebih jauh, pemanfaatan integrasi data lintas sektor (*cross-sectoral data integration*) di Australia memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan publik. Dengan tersedianya data yang terhubung antarinstansi, pemerintah dapat merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti (*evidence-based policy making*). Kondisi ini memungkinkan kebijakan publik dirumuskan tidak hanya berdasarkan asumsi atau pendekatan administratif tradisional, tetapi juga berdasarkan analisis data yang komprehensif dan real-time. Selain itu, digitalisasi juga memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal, sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di samping itu, transformasi digital di Australia juga berkontribusi terhadap perubahan budaya birokrasi menuju sistem pemerintahan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis kinerja. Penggunaan teknologi digital memungkinkan proses kerja yang lebih terukur, pengurangan prosedur administratif yang tidak efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan warga. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga telah mendorong perubahan struktural dalam tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Sementara itu, di Indonesia, transformasi digital juga mulai menunjukkan kontribusi positif terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan, terutama dalam aspek peningkatan transparansi layanan publik dan pengurangan praktik birokrasi manual yang selama ini dianggap lambat dan kurang efisien. Implementasi berbagai sistem digital seperti layanan perizinan elektronik, digitalisasi administrasi kependudukan, serta sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik telah membantu meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan mempercepat proses administrasi di berbagai sektor (Ningrum et al. 2026). Namun demikian, dampak positif tersebut masih belum merata di seluruh instansi dan wilayah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta tingkat integrasi sistem antarinstansi yang masih bervariasi. Akibatnya, transformasi digital di Indonesia belum sepenuhnya mampu menciptakan perubahan tata kelola yang bersifat menyeluruh (*comprehensive governance transformation*), melainkan masih bersifat parsial dan sektoral. Dalam banyak kasus, inovasi digital yang telah diterapkan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu ekosistem pemerintahan yang terpadu. Selain itu, tantangan dalam implementasi juga menunjukkan bahwa transformasi digital di Indonesia masih berada pada tahap transisi menuju tata kelola berbasis digital yang lebih matang. Proses ini tidak hanya membutuhkan penguatan teknologi, tetapi

juga reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan koordinasi antar level pemerintahan. Dengan demikian, meskipun arah perkembangan transformasi digital di Indonesia sudah menunjukkan kemajuan yang positif, namun proses menuju sistem tata kelola digital yang sepenuhnya terintegrasi masih memerlukan waktu dan penguatan kebijakan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, perbandingan antara kedua negara menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Namun, tingkat keberhasilan dan dampaknya sangat bergantung pada tingkat kematangan ekosistem digital, konsistensi kebijakan, serta kemampuan institusi dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pemerintahan secara menyeluruh.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital administrasi publik di Australia dan Indonesia memiliki perbedaan tingkat kematangan yang cukup signifikan, baik dari segi implementasi, tata kelola, maupun integrasi sistem pemerintahan. Australia telah mencapai tahap transformasi digital yang lebih matang dengan karakteristik utama berupa layanan publik yang terintegrasi, berorientasi pada pengguna (*citizen-centric services*), serta berbasis data (*data-driven government*). Pada tahap ini, transformasi digital tidak hanya dipahami sebagai proses digitalisasi layanan administratif, tetapi telah berkembang menjadi bagian integral dari reformasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Keberhasilan Australia dalam mencapai tingkat kematangan tersebut didukung oleh berbagai faktor kunci yang saling berkaitan. Dari sisi kelembagaan, adanya koordinasi nasional yang kuat melalui lembaga seperti Digital Transformation Agency (DTA) memungkinkan terciptanya standar dan arah kebijakan digital yang seragam di seluruh instansi pemerintah. Dari sisi kebijakan, konsistensi strategi transformasi digital jangka panjang memberikan kepastian dalam implementasi dan mengurangi fragmentasi kebijakan lintas sektor. Selain itu, dukungan infrastruktur digital yang maju, stabil, dan merata menjadi fondasi penting dalam memastikan seluruh layanan publik dapat diakses secara efisien oleh masyarakat. Tidak kalah penting, kepemimpinan digital yang kuat serta kapasitas sumber daya manusia yang tinggi turut mempercepat proses adopsi teknologi dan inovasi dalam sektor publik, sehingga transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi global. Sementara itu, Indonesia berada pada tahap pengembangan (*developing stage*) dalam transformasi digital administrasi publik melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahap ini, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong digitalisasi layanan publik melalui berbagai inovasi di sektor administrasi kependudukan, perizinan, perpajakan, dan layanan publik lainnya. Namun demikian, implementasi transformasi digital tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sistemik yang cukup kompleks. Tantangan utama yang dihadapi Indonesia meliputi fragmentasi sistem informasi antarinstansi yang menyebabkan rendahnya integrasi layanan publik, keterbatasan interoperabilitas data yang menghambat pertukaran informasi lintas sektor, serta kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Selain itu, perbedaan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pusat dan daerah juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital di Indonesia masih lebih berfokus pada digitalisasi layanan secara sektoral dibandingkan integrasi sistem pemerintahan secara menyeluruh. Lebih lanjut, perbandingan antara kedua negara menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi semata, tetapi juga oleh faktor-faktor non-teknis seperti kapasitas kelembagaan, konsistensi kebijakan, budaya birokrasi, serta kesiapan organisasi pemerintahan dalam mengadopsi perubahan. Australia menunjukkan bahwa transformasi digital yang berhasil memerlukan pendekatan yang terintegrasi, terkoordinasi secara nasional, serta berbasis data dan inovasi berkelanjutan. Sebaliknya, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa transformasi digital di negara berkembang memerlukan proses

bertahap yang mencakup penguatan koordinasi antarinstansi, standardisasi sistem digital, peningkatan literasi digital aparatur, serta pemerataan infrastruktur teknologi informasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital administrasi publik merupakan proses yang bersifat multidimensi dan kompleks, yang tidak hanya mencakup aspek teknologi, tetapi juga melibatkan dimensi kelembagaan, kebijakan, sumber daya manusia, serta konteks geografis dan administratif suatu negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kemampuan suatu negara dalam mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut ke dalam satu ekosistem tata kelola digital yang kohesif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik maupun praktis bagi pengembangan kebijakan transformasi digital di Indonesia, khususnya dalam upaya memperkuat integrasi sistem pemerintahan, meningkatkan interoperabilitas data, memperluas pemerataan infrastruktur digital, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur negara. Dengan penguatan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan transformasi digital di Indonesia dapat berkembang menuju tahap yang lebih matang dan mampu memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan kualitas layanan publik di masa mendatang.

5. SARAN

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi baik secara praktis maupun teoretis terhadap pengembangan kajian transformasi digital administrasi publik, khususnya dalam konteks perbandingan antara negara maju dan negara berkembang. Secara praktis, pemerintah Indonesia perlu memperkuat integrasi sistem dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mendorong standardisasi arsitektur sistem informasi di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Upaya ini penting untuk mengurangi fragmentasi sistem digital yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam optimalisasi layanan publik berbasis elektronik. Selain itu, peningkatan interoperabilitas data antarinstansi perlu menjadi prioritas agar tercipta ekosistem pemerintahan digital yang terhubung dan efisien. Dari sisi infrastruktur, pemerintah Indonesia juga disarankan untuk mempercepat pemerataan akses teknologi informasi, terutama di wilayah terpencil dan daerah dengan keterbatasan jaringan internet. Pemerataan infrastruktur ini menjadi prasyarat penting dalam menciptakan transformasi digital yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara melalui pelatihan literasi digital, penguatan kompetensi teknologi informasi, serta adaptasi terhadap teknologi baru seperti artificial intelligence dan data analytics juga perlu terus ditingkatkan agar implementasi digital government dapat berjalan lebih optimal. Dari perspektif tata kelola, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi dalam implementasi kebijakan digital nasional agar tidak terjadi tumpang tindih program dan sistem. Penguatan peran lembaga koordinatif seperti pengelola SPBE juga penting untuk memastikan arah transformasi digital berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Sementara itu, dari sisi kebijakan, diperlukan keberlanjutan strategi transformasi digital jangka panjang yang tidak berubah secara drastis akibat pergantian kepemimpinan, sehingga proses digitalisasi dapat berjalan secara stabil dan terarah. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang digital governance dan comparative public administration. Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh aspek kelembagaan, kebijakan, sumber daya manusia, serta konteks sosial dan geografis suatu negara. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan menambahkan variabel lain seperti budaya organisasi, tingkat partisipasi publik dalam layanan digital, serta analisis kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas transformasi digital secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustin, Winda, and others. 2026. "Perbandingan E-Government Di Negara Indonesia Dan Australia." *As-Sulthan Journal of Education* 3(1):690–700.
- [2] Ainia, Bunga, Dhea Kartika Anatasya, Indri Ramadhani Putri, Jumiati Jumiati, and Boni Saputra. 2025. "Model Hybrid Bureaucracy Dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik: Studi Komparatif Urban-Rural Di Indonesia Pasca-Pandemi (2020--2025)." *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika* 2(3):76–83.
- [3] Arfani, Riza Noer, and Kuskridho Ambardi. 2024. *Transformasi Digital Dan Daya Saing Seleksi Kasus*. UGM PRESS.
- [4] Arif, Ahmad, and Kata Kunci. 2024. "Kesiapan Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Implementasi Bukti Digital: Kajian Sistematis Dan Perbandingan Internasional." *Journal of Law and Digital Policy* 2:31–44.
- [5] Astuti, Dewi Saptantinah Puji. 2005. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Manajemen Laba Di Seputar Right Issue." Universitas Gadjah Mada.
- [6] Awalliyah, Nurul, Barokah Rahma, and Ika Kurnia Sofiani. 2025. "Literacy and Numeracy Development: A Comparative Study Between Indonesia and Australia." *Responsive: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1(2):131–44.
- [7] Bahasoan, Awal Nopriyanto, B. Indayani, Maghfirah Sari Azis, and others. 2025. "Transformasi Digital Pada UMKM: Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Dan Inklusi Di Negara Berkembang." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5(1):9–19.
- [8] Djatmiko, R. M. Gatot Hery. 2023. *Transformasi Kebijakan Administrasi Publik Menuju Era Society 5.0*. Penerbit Adab.
- [9] Farasa, Nisa, and Hanson E. Kusuma. 2015. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebetahan Di Kafe: Perbedaan Preferensi Gender Dan Motivasi." *Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2015*:29–34.
- [10] Imelda, Chitra, Hasanuddin Hasanuddin, and Waliadin Waliadin. 2026. "Integrasi Nilai Budaya Lokal Dalam Pelayanan Publik Digital: Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 2(8):1438–45.
- [11] Indonesia, Republik, and Kementerian Perhubungan Republik. n.d. "Penulis: Sebastiaan van Doorn, University of Western Australia Arnold Japutra, University of Western Australia Ami Fitri Utami, Universitas Indonesia Irwan Adi Ekaputra, Universitas Indonesia."
- [12] Irfan, B., and Anirwan Anirwan. 2023. "Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 4(1):23–31.
- [13] Iriani, Nisma, G. A. K. R. S. Dewi, Sudjud, A. S. D. Talli, S. E. Mm, S. P. Surianti, and T. Nuraya. 2022. *Metodologi Penelitian*. Rizmedia Pustaka Indonesia.
- [14] Khairani, Nida, and Theodorus Sendjaja. 2024. "Akselerasi Transformasi Digital Sebagai Katalisator Pertumbuhan Ekonomi: Studi Komparatif Kebijakan Singapura Dan Indonesia." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 5(12).
- [15] Khotimah, Khusnul, Mohammad Baladdudin Dayar, Ach Ilyasi, Nur Wahdatul Chilmy, Faiqoh Nurul Hikmah, Imam Sunarto, and Nanny Mayasari. 2025. *ADMINISTRASI PUBLIK Birokrasi Menuju Transformasi Digital*. Penerbit Widina.
- [16] Lubis, M. S. 2018. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- [17] Maulita, Dian, Dien Sefty Framita, and Lulu Nailufaroh. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laba." *Jurnal Economina* 1(1):1–12.
- [18] Muhyi, M. 2018. *Metodologi Penelitian*. Adi Buana University Press.
- [19] Ningrum, Tri Rahayu Setya, Yoni Edwar, Ari Isnu Wibowo, Sularni Sularni, Adi Asmara, and Kashardi Kashardi. 2026. "Peran Pemerintah Dan Kebijakan Pendidikan Perbandingan Dengan

- Negara Lain.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4(4):4448–55.
- [20] Pratama, Angga Ariessandy Putra, and Rifqi Ridlo Phahlevy. 2025. “Comparative Study of Public Administration in the UK and Australia: Studi Perbandingan Administrasi Publik Di Inggris Dan Australia.” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20(4):10–21070.
- [21] Sangaji, Muhammad Salman Jabbar, and Jusuf Irianto. 2025. “Transformasi Inovasi Pelayanan Publik Menuju Pemerintahan Digital Public Service Innovation Transformation towards Digital Government.” *Jejaring Administrasi Publik* 6(3):654–67.
- [22] Sepriano, Sepriano, Asep Hikmat, Musran Munizu, Afni Nooraini, Sundari Sundari, Salamatul Afiyah, Anny Riwayati, and Cynthia Febri Sri Indarti. 2023. *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [23] Setiowati, Dewi, Diah Indriani, Inayah Wisartika, and Selvi Alvinda Fitriyani. 2026. “Analisis Strategis Dampak Transformasi Digital Indonesia: Studi Literatur Pada Sektor Publik, Ekonomi, Dan Pendidikan.” *SITEKNIK: Sistem Informasi, Teknik Dan Teknologi Terapan* 3(1):22–31.
- [24] Syafitri, Indrian, Nurman Nurman, Annisa Mardatillah, and Resti Hefriyenni. 2025. “Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD): Studi Kesiapan SDM Dalam Era Transformasi Digital Di Provinsi Riau.” *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 11(2):277–301.
- [25] Yogopriyatno, Jatmiko, and S. IP. n.d. *Perbandingan Ilmu Administrasi Publik*. Penerbit Adab.
- [26] Yulanda, Aseng, and M. Fachri Adnan. 2023. “Transformasi Digital: Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Ditinjau Dari Perspektif Administrasi Publik.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1(3):103–10.